

Bentuk Pansus Aset Pemprov DPRD Tunggu Audit BPK-RI

PONTIANAK. DPRD Kalbar tidak mau disebut omong kosong dalam membentuk Pansus Aset. Ketua DPRD Kalbar berkilah masih menunggu hasil audit aset dari BPK RI Perwakilan Kalbar yang akan disampaikan dalam rapat

paripurna, Kamis (3/11) hari ini. "Kita membentuk pansus aset harus ada dasar, makanya hasil audit BPK-RI sebagai acuan kita. Memang kita bisa meneliti angka-angka aset tanpa adanya audit BPK-RI," ujar Minsen SH, Ketua

DPRD Kalbar membantah pernyataan juru bicara KONI Kalbar Ir H Lutfi A Hadi yang mengatakan bahwa pembentukan Pansus Aset yang didalamnya menyikapi aset KONI Kalbar yang dijanjikan oleh DPRD Kalbar hanya omong

kosong semata. Menurut Minsen, DPRD Kalbar serius menangani masalah aset. Bahkan bukan hanya aset Pemprov Kalbar yang dikelola KONI. Apalagi Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalbar baru mau rapat kerja. Selasa (2/11) malam. Banmus akan menentukan jadwal jadi atau tidak membentuk Pansus Aset.

"Mengenai jadi atau tidaknya rencana Pansus Aset DPRD Kalbar, akan kita lihat dalam dinamika yang berkembang pada saat rapat Banmus nanti. Yang jelas beberapa waktu lalu kita tunda pembentukan Pansus Aset karena menunggu audit BPK," ungkap Minsen.

Dikatakan Minsen, Rabu (3/11), baru ada rapat paripurna DPRD Kalbar tentang penyerahan hasil audit BPK-RI mengenai aset. Jadi bukan hanya masalah KONI saja. "Tinggal nanti mau diapakan barang itu (aset) tergantung keputusan pemerintah Kalbar bersama DPRD Kalbar apakah mau dimusnahkan, dijual atau mau

diapakan nanti," jelas Minsen.

Ketua Komisi A DPRD Kalbar, H Retno Pramudya SH MH mengatakan, sudah sebanyak 21 anggota dari 55 anggota DPRD Kalbar telah menandatangani persetujuan Pansus Aset. Bahkan sebelum mencuat kasus alih fungsi lahan KONI, 21 dewan sudah menandatangani dan telah dua kali mengajukan surat permohonan pembentukan Pansus Aset kepada Ketua DPRD.

Dikatakan Retno, Pansus Aset harus dibentuk. Apalagi begitu banyak masalah yang menyelumuti aset Pemprov Kalbar. Tidak hanya masalah pengelolaan dan pemanfaatan aset tanah KONI saja, tetapi masih banyak masalah-masalah lainnya yang menyangkut aset-aset daerah. "Masalah aset harus segera dibenahi dan diselesaikan permasalahannya. Sehingga ke depannya aset Pemprov Kalbar akan tertata dan terkelola dengan baik, serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat Kalbar," tegas Retno. (jul)